BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya Mardi (2011), dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan – keputusan yang sekarang atau yang akan datang. Informasi dikatakan berkualitas menurut Mc. Leod (2007) apabila memiliki ciri-ciri yaitu seperti akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Sedangkan menurut Kieso (2007) kualitas informasi terdiri dari relevansi dan realibilitas yang merupakan dua kualitas primer yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan.

Kualitas Informasi menjadi salah satu perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara *on-line* melalui sistem Modul Penerimaan Negara, dimana masih ada kelemahan dalam sistem tersebut (Darmin Nasution, 2007). Masalah kualitas informasi juga ditujukkan dengan pernyataan Boediono bahwa lebih dari 20 laporan keuangan kementerian dan lembaga negara belum mendapatkan penilaian wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, relevansi dan reabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahpun dinilai masih jauh dari memuaskan (Boediono, 2011). Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009, ditemukan kerugian negara di Kantor

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu hingga Rp 96 triliun, dan KPP yang bersangkutan belum melakukan tindak lanjut secara optimal atas potensi penerimaan pajak tersebut. Ini mengakibatkan peredaran usaha yang dilaporkan tidak dapat diyakini kebenarannya. BPK menilai potensi kerugian negara tersebut sebagai akibat dari kelemahan sistem pengendalian internal pada kegiatan operasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu pada tahun anggaran 2008 dan 2009 (Herdaru Purnomo, 2010).

Untuk mencapai informasi yang berkualitas dan mencerminkan keadaan sebenarnya atau akurat (Mc Leod, 2007), yang harus dilakukan antara lain peyempurnaan metode pencatatan dan sistem akuntansi dalam rangka pelaporan keuangan negara, perbaikan proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), penyempurnaan sistem dan aplikasi administrasi penerimaan negara, penertiban rekening pada Kementerian negara/Lembaga dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi, penilaian kembali dan sertifikasi, melakukan penertiban pengelompokan jenis belanja dalam penganggaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh K/L dan pemerintah daerah (Agus Martowardojo, 2011).

Informasi akuntansi yang berkualitas dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang mengoptimalkan operasi sistem akuntansinya, karena Sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan dijadikan manajer untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Dan juga sistem

informasi akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan manajemen bisnis yang berkualitas (Ivana Mamic, 2006).

Kualitas informasi memiliki peran penting dalam proses pengadopsian sistem informasi akuntansi, bukti ini menunjukkan bahwa suatu organisasi harus memperoleh pengetahuan tentang ukuran kualitas informasi yang tepat. Agar sistem pengadopsian ini meningkatkan kinerja dan membuat keuntungan bagi suatu organisasi (Wongsim & Jing Gao, 2011).

Keberhasilan studi SIA telah menjadi salah satu yang sulit dipahami untuk didefinisikan. Taksonomi ini berpendapat enam dimensi utama atau kategori keberhasilan SIA, kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu dan dampak organisasi (Delone, 1992).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan (Azhar Susanto, 2009).

Fungsi dari sistem informasi adalah untuk menyajikan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan perbaikan selanjutnya; untuk menyajikan informasi sebagai pendukung kegiatan operasional sehari – hari; untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan atau struktur manajemen (Mardi, 2011).

Sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan adalah sistem yang mempunyai pengendalian memadai sehingga informasi yang dihasilkan oleh

sistem tersebut dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini pengendalian merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi akuntansi yang ada (Romney et al, 2003).

Komponen sistem informasi merupakan bagian atau partial sistem informasi yang membentuk sistem informasi (Mardi, 2011), terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, teknologi jaringan komunikasi (Azhar Susanto, 2009).

Saat ini yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan tiga komponen SIA, yaitu: *software* (perangkat lunak), *brainware* (sumber daya manusia), dan *network* (jaringan telekomunikasi). Sebagai salah satu instrumen penting dalam menghimpun penerimaan negara melalui pembayaran pajak, DJP memiliki sebuah *software* yakni sistem aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2007 (Heryanto Sijabat, 2011).

Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini *software* tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, hal itu menyebabkan sering terjadinya perbedaan pencatatan antara Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Negara (Melkias Markus Mekeng, 2010). Tidak terintegrasinya *software* tersebut juga menjadi salah satu temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2010 dikarenakan pencatatan penerimaan menurut kas negara dan DJP menunjukkan jumlah yang berbeda (Taufiequrachman Ruki, 2011).

Program aplikasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP merupakan aplikasi Sistem Informasi yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat.

Tujuan utama dibentuknya sistem informasi DJP dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak. Diharapkan penerapan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih baik dan berkualitas (Mirwan Amin, 2011).

Kelemahan SIDJP yaitu ketika beban kerja tinggi maka kinerja SIDJP menjadi lamban atau bahkan '*hang*'. Padahal SIDJP baru diterapkan dibeberapa KPP, apalagi jika seluruh KPP dan unit vertikal lainnya menerapkan. Salah satu penyebabnya adalah SIDJP tersentralisasi di Kantor Pusat DJP. Terdapat masalah migrasi data atas perubahan sistem lama yaitu SIPmod ke SIDJP. Data pada SIDJP tidak dapat diakses oleh sistem baru. Sistem informasi SIDJP hanya dapat mengelola data atas data yang telah di – entry pada SIDJP, tidak dapat melakukan data minning pada database sistem lama. Akibatnya terjadi nya kegagalan migrasi data (Dimas Besmaputra,2009).

Demikian pula yang diungkapkan oleh Kasi Waskon (Novianto, 2012) bahwa fenomena khusus yang terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas dalam penerapan SIDJP (aplikasi MPN) adalah masih dirasakan lambat dalam pengguna SIDJP saat ini karena kapasitas jaringan atau server yang tersedia belum optimal, jadi aksesnya menjadi lambat. SIDJP digunakan di pulau Jawa atau kota-kota besar lainnya sedangkan yang lainnya masih memakai SIPMod bisa dibilang bahwa SIDJP kurang terintegrasi di seluruh Indonesia. Karena SIDJP mengandalkan jaringan, maka server itu sangat penting bagi SIDJP yang

merupakan sistem yang terintegrasi ke seluruh Indonesia. Akibatnya KPP dapat mengalami hambatan dalam migrasi data dan kesulitan mengakses informasi yang sifatnya penting dan mendesak atau timelines (Novianto, 2012).

MPN sebagai bagian dari SIDJP merupakan modal yang dapat memantau informasi menjadi lebih akurat dan tepat waktu, membantu wajib pajak untuk menyetorkan pembayaran pajak maupun nonpajak selama 24 jam, membayar pajak dengan berbagai fasilitas seperti e-banking 24 jam. (Sri Mulyani, 2006). Namun BPK menemukan adanya perbedaan realisasi penerimaan perpajakan dan kelemahan pencatatan penerimaan perpajakan dalam aplikasi modul penerimaan negara. Sehingga sampai saat ini aplikasi MPN masih belum terintegrasi (Achmad Aris, 2010).

Aplikasi yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak yaitu aplikasi MPN memliki keterkaitan dengan sistem pengolahan transaksi, keduanya saling berintegrasi. Pengolahan transaksi pada MPN berupa rangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan, pengiriman dan pemasukan data untuk disimpan atau diproses sehingga menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi pemakai. (Azhar Susanto, 2007)

Kelemahan Modul Penerimaan Negara hanya sebagian kecil dari buruknya seluruh sistem yang ada. Hingga kini, direktorat Pajak masih menjalankan dua sistem, yakni sistem informasi pajak yang dimodifikasi (SIP-Mod) dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIP-Mod adalah sistem lama yang membuka seluruh akses datanya ke kantor di daerah. Sistem ini membuka celah bagi seorang pegawai pajak untuk membuka file wajib pajak. Sebaliknya, SIDJP

menyatukan seluruh data dalam database tunggal. Lewat sistem ini, seluruh data dan pencatatan pajak terekam dengan sistem terkunci. Siapa pun yang masuk, apalagi mengubah, akan terekam jejaknya. Tetapi tidak gampang mengubah SIP Mod menjadi SIDJP. Sampai kini, sebagian besar kantor pelayanan pajak masih menggunakan SIP-Mod. Selain problem teknologi, dia mengungkapkan, jajaran petinggi Direktorat Jenderal Pajak tak satu suara dalam urusan ini. Satu mempertahankan sistem lama, satu lagi berniat memodernisasi (Sri Mulyani, 2010).

Demikian pula menurut Sigit Pramudito bahwa sistem informasi penerimaan negara (MPN) memang banyak masalah, baik di sisi internal maupun eksternalnya. Dari sisi internal misalnya, tidak semua pihak yang terkait dengan MPN ini mempunyai kapasitas yang sama. Sementara itu dari sisi eksternal, sebagian besar bank persepsi-yaitu bank yang menerima setoran pembayaran pajak-belum memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam kerja sama antara Depkeu dan bank. Ada yang mengklaim semua kantor cabang sudah online, tapi nyatanya tidak. Tapi yang paling parah, kemampuan TI mereka tidak seandal yang kita bayangkan. Problem-problem semacam itulah yang membuat sistem MPN bermasalah, akibatnya kualitas dari ouput MPN bisa saja tidak akurat (Sigit Pramudito, 2008).

Dengan Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas, maka kualitas informasi yang dihasilkan akan mempengaruhi keberhasilan suatu struktur organisasi. Artinya, kualitas informasi merupakan suatu keunggulan kompetitif

bagi suatu organisasi. (Hongjiang Xu, 2009). Sistem Informasi Akuntansi dipengaruhi organisasi, salah satunya struktur organisasi (Mahdi Salehi, 2011).

Sistem informasi akuntansi adalah kesatuan struktur organisasi, yang menyediakan sumber daya fisik, dan komponen-komponen lainnya untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi, dengan tujuan menciptakan kepuasan terhadap kebutuhan informasi untuk berbagai macam penggunanya (Wilkinson,2000).

Perubahan struktur organisasi dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Selama ini struktur organisasi Ditjen Pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal. Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah, Ditjen Pajak merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya dengan melakukan perubahan struktur organisasi secara bertahap. Perubahan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak berbasis administrasi modern yang didasarkan pada fungsi, membuat struktur

organisasi menjadi lebih ramping, sehingga dapat meningkatkan efektifitas KantorPelayanan Pajak (Djazoeli Sadhani, 2005).

Reformasi administrasi terkait dalam organisasi dan teknologi informasi., dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP Pratama (Nur Ilavi Hudijani, 2007).

Dalam struktur yang modern ini terdapat perbedaan yang cukup radikal dan signifikan yakni yang dulunya struktur organisasi KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak diubah menjadi berdasarkan fungsi guna debirokratisasi pelayanan seperti Seksi Pelayanan dan Seksi Pemeriksaan dibentuk secara terpisah. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KP.PBB ke KPP Pratama (Rusdiyani, 2009).

Sistem pajak seperti ini masih banyak kendala dalam penerapannya, baik kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak maupun yang dihadapi wajib pajak. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah teknis dalam sistem online masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses pembayaran menjadi terhambat. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami benar sistem MP3 dan belum

diharuskannya wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara online (Kusrini, 2009).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. MPN sebagai bagian dari SIDJP , namun sistem pencatatan data realisasi penerimaan pajak sampai saat ini belum terintegrasi.
2. Migrasi data atas perubahan sistem lama yaitu SIPmod ke SIDJP ternyata terdapat kelemahan ketika beban kerja tinggi maka kinerja SIDJP menjadi lamban atau bahkan '*hang'*.
3. Hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009, ditemukan potensi kerugian negara di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu hingga Rp 96 triliun. Ini mengakibatkan peredaran usaha yang dilaporkan tidak dapat diyakini kebenarannya.
4. MPN merupakan modal yang dapat memantau informasi menjadi lebih tepat waktu, namun sistem ini masih terdapat kelemahan.
5. Lebih dari 20 laporan keuangan kementerian dan lembaga negara belum mendapatkan penilaian wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, relevansi dan reabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahpun masih dinilai masih jauh dari memuaskan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Seberapa Besar Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1 secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini semata-mata adalah untuk maksud rencana penyusunan skripsi. Adapun pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah Struktur Organisasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Informasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Struktur Organisasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

3. Untuk mengetahui Kualitas Informasi yang dihasilkan KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung mengenai Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

2. Bagi Instansi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dari sisi akademisi mengenai Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem

Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

3. Bagi Peneliti Lain

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1. yaitu :

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372
9.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Juli 2012.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1.Membuat outline dan proposal UP	■				
	2.Bimbingan dengan dosen pembimbing		■	■	■	■
	3.Mengambil formulir penyusunan UP		■			
	4.Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1.Mengajukan outline dan proposal Up		■			
	2.Meminta surat pengantar ke Kanwil DJP Jabar I			■		
	3.Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak			■	■	
	4.Penyusunan skripsi			■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1.Menyiapkan draft skripsi					■
	2.Sidang akhir skripsi					■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4.Penggandaan skripsi					■